

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo). Sedangkan Menurut Dwiyanto, akuntabilitas sebagai suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan stakeholder.

Konsep akuntabilitas mulai dikaji secara intensif pada sektor publik seiring dengan berkembangnya konsep mengenai *reinventing government* (Osborne dan Gaebler). Dalam buku mereka yang berjudul *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector*, konsep akuntabilitas disebut sebanyak sembilan kali. Hal ini menunjukkan bahwa Osborne dan Gaebler semenjak

awal hendak memberikan penekanan akan pentingnya pemahaman dan praktik bagi aktor-aktor wirausaha sektor publik mengenai pentingnya akuntabilitas.<sup>1</sup>

Penulis yang berbeda, yaitu Osborne dan Christensen, et.al, menjelaskan bahwa sejalan dengan penekanan akuntabilitas pada *reinventing government*, ternyata konsep akuntabilitas juga masuk sebagai fokus utama dalam Manajemen Publik Baru atau yang sering kali disebut dengan istilah *New Public Management* (NPM). Oleh karenanya, akuntabilitas dapat dikatakan sebagai faktor pembeda utama antara kajian Administrasi Publik Klasik (*old Public Administration*) dengan *New Public Management*. Hal ini bermakna bahwa akuntabilitas harus dilaksanakan oleh organisasi sektor publik moderen sebagai cerminan upaya meningkatnya keberpihakan terhadap kepentingan publik.

Akademisi lainnya yakni Peters menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan konsep yang berbeda dari tanggung

---

<sup>1</sup> Dahnil Anzar Simanjuntak, Yeni Januarsih. "Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Dimasjid". *Jurnal Ekonomi*. Volume 1, no 4, 1-25, tahun 2015.

jawab (responsibilitas). Akuntabilitas lebih merujuk pada relasi organisasi sebagai sebuah entitas dengan pihak di luar organisasi. Artinya, level analisis akuntabilitas adalah pada tingkat makroorganisasi yang menekankan pada aspek sosiologi organisasi dengan fokus interaksi antara organisasi dengan pihak-pihak yang berelasi pada organisasi tersebut. Sedangkan tanggung jawab lebih menekankan pada level individual sebagai keharusan anggota di dalam suatu organisasi public untuk menunjukkan perilaku yang sejalan dengan standar etika yang telah ditetapkan sebagai aturan dan melaksanakan pekerjaan dengan benar sesuai dengan arahan dan pelatihan yang telah diterimanya.

Hal ini semakin dipertegas oleh Bryner dalam Peters yang menjelaskan bahwa sebagai bagian dari organisasi sektor publik, maka anggota organisasi harus patuh terhadap hukum yang secara umum mengatur bagaimana sebuah kebijakan diadministrasikan dan khususnya hukum yang secara spesifik mengatur program tertentu yang tengah mereka laksanakan. Penjelasan ini semakin terang manakala

kita mencoba untuk memetakan tiga konsep sekaligus yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, dan responsivitas sebagai bagian dari transparansi kepada publik secara keseluruhan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Gortner, Nichols, dan Ball, Dalam hal ini dijelaskan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu elemen dari tiga elemen yang ada. Akuntabilitas merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana sebuah organisasi mampu memberikan penjelasan atas tindakan yang mereka lakukan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan secara politik untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap organisasi tersebut.

Penulis lainnya yaitu Day dan Klein dalam Peters mendefinisikan bahwa akuntabilitas merupakan mekanisme untuk menjalankan pengendalian terhadap organisasi publik.

Namun, menurut Osborne, akuntabilitas lebih dari sekadar menjalankan pengendalian terhadap organisasi publik dan program publik, akuntabilitas juga merupakan sarana yang memandu bagi organisasi dalam usahanya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program. Hal ini dapat

ditinjau sebagai upaya untuk membuat catatan-catatan atas kesalahan yang dilakukan pada pelaksanaan suatu program di masa lalu yang kemudian menjadi panduan untuk mereduksi angka kesalahan tersebut di masa mendatang.

Akuntabilitas memiliki lima buah dimensi yaitu transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas (Aman, Al-Shbail, dan Mohammed). Dalam bagian ini akan dibahas masing-masing dimensi tersebut yang dikaitkan dengan berbagai kasus yang relevan dengan permasalahan akuntabilitas. Dimensi pertama adalah transparansi. Dalam konteks akuntabilitas, transparansi dipahami sebagai kemudahan akses untuk mendapat informasi terkait dengan fungsi dan kinerja dari organisasi.<sup>2</sup>

Berdasarkan definisi teoritis tersebut maka organisasi publik diharapkan untuk selalu mengomunikasikan fungsi dan kinerja mereka Guna memperbaiki situasi tersebut, diperlukan upaya untuk meningkatkan sosialisasi. Caranya dengan

---

<sup>2</sup> Susi Haryanti, M. Elfan Kaubab. Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid DI Wonosobo (Studi Empiris Pada Masjid Yang Terdaftar Dikemenag Wonosobo Tahun 2019), *Journal of Economic, Business and Engineering* Vol. 1, No. 1, Oktober 2019.

menambah pasokan informasi yang memadai untuk diakses oleh para pemangku kepentingan yang terkait dengan organisasi publik dimaksud. Berbagai saluran sosialisasi perlu untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk memberikan penjelasan mengenai fungsi dan kinerja organisasi publik. Sehingga para pemangku kepentingan memiliki informasi dan pengetahuan yang memadai termasuk dalam memberikan penilaian atas kinerja organisasi publik.

Dimensi kedua adalah pertanggung jawaban. Dimensi ini merujuk pada praktik untuk memastikan individu dan atau organisasi bertanggung jawab atas tindakan dan aktivitasnya, memberikan hukuman pada tindakan yang salah dan memberikan penghargaan atas kinerja yang baik. Dimensi ini dipahami sebagai upaya untuk memberikan konsekuensi yang serius atas kelalaian organisasi publik dalam memberikan pelayanan atau dalam menyediakan barang publik.

Dimensi ketiga adalah pengendalian. Dimensi ini merujuk pada situasi bahwa organisasi melakukan secara tepat apa yang menjadi perintah utamanya. Dalam dimensi

pengendalian, pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi publik dapat memastikan bahwa organisasi publik tersebut tetap berjalan pada jalur yang semestinya. Pengendalian ini apabila dilakukan dengan konsisten maka akan membantu untuk mengurangi bahkan meniadakan tumpang tindih kewenangan, kebijakan, dan program antar organisasi publik. Sebagai implikasinya maka kualitas koordinasi antarorganisasi publik dapat semakin meningkat.

Dimensi keempat adalah tanggung jawab. Maksud dari dimensi ini adalah organisasi hendaknya dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku. Pada sektor publik tentunya aturan kebijakan menjadi pengikat bagi organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karenanya, kepatuhan dalam penerapan hukum yang berlaku penting untuk dikedepankan. Penerapan aturan hukum yang konsisten akan membantu organisasi publik untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang mungkin akan dihadapi dalam menjalankan aktivitas organisasi publik. Tentunya hal ini akan terlaksana konsisten jika tata dan kualitas aturan yang dijadikan pijakan dapat

diandalkan dengan baik. Artinya aturan hukum hendaknya disusun dengan sebaik mungkin, agar organisasi publik dapat melakukan berbagai aktivitasnya dengan lancar.

Dimensi kelima adalah responsivitas. Maksud dari dimensi ini adalah organisasi menaruh minat dan berupaya untuk memenuhi harapan substantif para pemangku kepentingan yang bentuknya berupa artikulasi permintaan dan kebutuhan. Dimensi responsivitas dapat dianggap sebagai dimensi yang krusial dari akuntabilitas. Tentunya hal ini juga bukan dimaksudkan untuk melupakan dimensi-dimensi akuntabilitas yang telah diuraikan sebelumnya. Namun, ada yang penting untuk digarisbawahi dari dimensi ini yaitu betapa kita perlu menyadari bersama bahwa eksistensi organisasi publik pada prinsipnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat yang betuk konkretnya adalah menjawab kebutuhan dan permintaan masyarakat dengan tepat dan efisien. Kehadiran organisasi pemerintah di tengah-tengah publik tentunya sangat bergantung dari responsivitas pemerintah.



## 1. Aspek Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah konsep yang penting dalam konteks manajemen, pemerintahan, dan organisasi. Secara umum, akuntabilitas mengacu pada kewajiban seseorang atau organisasi untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan pengelolaan sumber daya yang mereka lakukan. Ada beberapa aspek kunci yang terkait dengan akuntabilitas:

**Transparansi:** Transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejelasan dalam tindakan, keputusan, dan proses organisasi. Organisasi yang transparan mengungkapkan informasi yang relevan dan penting kepada pihak yang berkepentingan, termasuk pemangku kepentingan internal dan eksternal. Ini mencakup pelaporan keuangan, kebijakan organisasi, dan informasi lain yang relevan.

**Pelaporan:** Aspek pelaporan adalah bagian penting dari akuntabilitas. Organisasi harus secara teratur menyampaikan informasi tentang kegiatan mereka, baik

itu keuangan, operasional, maupun strategis. Pelaporan yang akurat dan tepat waktu membantu pemangku kepentingan untuk memahami kinerja organisasi dan mengambil keputusan yang informasional.

**Pertanggungjawaban:** Pertanggungjawaban berarti memegang individu atau organisasi bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Ini melibatkan pengakuan dan penilaian terhadap kinerja dan konsekuensi dari tindakan tersebut. Pertanggungjawaban juga dapat mencakup proses perbaikan dan pembelajaran dari kesalahan atau kegagalan.

**Kewajaran:** Konsep kewajaran mencakup kesesuaian atau kesesuaian tindakan dengan standar moral, etika, dan hukum yang berlaku. Organisasi yang bertindak secara kewajaran mengikuti prinsip-prinsip moral dan etika dalam pengambilan keputusan dan tindakan mereka.

**Kontrol dan Pengawasan:** Aspek kontrol dan pengawasan penting untuk memastikan bahwa organisasi

beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Ini melibatkan implementasi sistem dan prosedur untuk memantau kinerja, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan mengidentifikasi risiko yang mungkin mengganggu pencapaian tujuan organisasi.

Partisipasi: Partisipasi melibatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Melibatkan pemangku kepentingan memungkinkan mereka untuk mempengaruhi keputusan yang memengaruhi mereka dan meningkatkan tingkat dukungan dan kepatuhan terhadap kebijakan dan program organisasi.

Ketika semua aspek ini diterapkan dengan baik, organisasi menjadi lebih akuntabel dalam tindakan dan keputusan mereka. Ini membantu membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan dan meningkatkan kinerja serta keberlanjutan jangka panjang organisasi.

## 2. Akuntabilitas Dalam Hubungan Kekuasaan

Akuntabilitas sangat terkait dengan hubungan kekuasaan. Karena akuntabilitas menuntut adanya kemampuan principal untuk memberi sanksi kepada agen, hubungan akuntabilitas bisa terjadi hanya jika principal bisa mempengaruhi agen. Di sisi ekstrim, bila principal nominal (berdasarkan dugaan) tidak memiliki kemampuan untuk memberi sanksi kepada pembuat keputusan, agen tidak wajib menjelaskan kebijakannya sehingga tidak menanggung akuntabilitas (tanggung jawab) sama sekali. Salah satu karakteristik hubungan akuntabilitas adalah bahwa para aktor yang menuntut pengaruh melakukannya dengan menggunakan bahasa normatif.

Principal menegaskan hak-haknya mengontrol perilaku agen, dan sebagaimana kita tahu, para aktor saling bersaing untuk mendapatkan akses ke agen. Dimana, aktor-aktor ini bersaing agar bisa dianggap sebagai principal. Dalam bahasa kekuasaan, hubungan akuntabilitas adalah suatu hubungan dimana aktor yang

membuat pernyataan normatif bahwa ia memiliki pengaruh atas aktor lainnya (principal) sebenarnya memang memiliki pengaruh seperti itu, dan dimana aktor tersebut berkewajiban mempengaruhi (agen) memiliki kebijaksanaan yang signifikan. Hubungan kekuasaan yang bukan merupakan hubungan akuntabilitas meliputi pengawasan langsung bawahan yang tidak memiliki kebijaksanaan, dan memiliki kekuasaan tanpa pernyataan normatif bahwa seseorang berhak untuk melakukan demikian (memerintah). Walaupun hampir semua anggota kelompok memiliki tanggung jawab, karena hampir semua anggota dipengaruhi oleh anggota yang lain. Namun, menetapkan bahwa terdapat akuntabilitas tidaklah memberi kesimpulan yang secara normatif signifikan.<sup>3</sup>

Dari sudut normatif, pertanyaan relevan adalah apakah susunan hubungan akuntabilitas sesuai dalam hal tipe dan tingkatannya. Apakah mekanisme akuntabilitas yang diterapkan merupakan tipe yang paling efektif

---

<sup>3</sup>Prof. Dr.Hj.Sjamsiar Sj. Indradi ,MS. *Akuntabilitas*, (Malang: Erlangga. 2020),h 128.

dengan pengaruh negatif yang paling kecil, Dan apakah agen menuntut ukuran akuntabilitas yang tepat, Dengan memperhatikan hubungan antara akuntabilitas dan efisiensi, kita mungkin dapat menemui terlalu banyak ataupun terlalu sedikit akuntabilitas. Prinsipal bukan satu-satunya pihak yang membuat klaim, agen juga membuat tuntutan. Namun, umumnya agen berusaha menghindari akuntabilitas, yang membatasi kebebasan mereka. Maka, agen lebih menyukai bahasa tanggung-jawab daripada bahasa akuntabilitas.

Agen yang bertanggung-jawab bertindak atas nama orang lain, sehingga diberi otoritas untuk bertindak. Maka, tanggung jawab terkait erat dengan konsep representasi, yang didefinisikan secara singkat oleh Hanna Pitkin sebagai "tindakan substantif untuk orang lain".

Namun, pelaku yang bertanggungjawab sebenarnya tidak 'accountable'. Kita memiliki alasan untuk menuntut bahwa agen yang bertanggung-jawab harus bertindak seakan-akan mereka harus menunjukkan akuntabilitasnya.

Kita diharapkan bertindak seakan-akan kita harus mempertanggung-jawabkan tindakan kita. Maka, kita harus memiliki alasan atas apa yang kita lakukan, dan siap untuk membenarkan tindakan kita pada orang untuk siapa kita bertindak, meskipun penjelasan atau justifikasi ini tidak pernah benar-benar muncul. Pelaku yang bertanggung-jawab dipandang sebagai individu yang mengidentifikasi dengan organisasi atau sebab, sehingga dia menanamkan nilai dan tindakan yang sesuai dengan mereka, tanpa memandang apakah dia akan dituntut orang lain untuk menunjukkan akuntabilitasnya.<sup>4</sup>

Peran tertentu dikaitkan dengan jabatan atau susunan prinsip yang ditegakkan tanpa memperhatikan apakah seseorang berusaha menuntut orang lain menunjukkan akuntabilitas atas tindakannya. Agen kuat lebih tertarik dengan tanggungjawab daripada akuntabilitas. Seperti Herbert Simon, mereka dapat

---

<sup>4</sup>Prof. Dr.Hj.Sjamsiar Sj. Indradi ,MS. *Akuntabilitas*, (Malang: Erlangga. 2020),h 130..

mempertahankan preferensi ini berdasarkan efisiensi; dibutuhkan biaya lebih besar untuk memantau agen daripada mempercayai mereka memiliki motivasi yang baik. Atau seperti yang berlaku dalam tradisi republican, mereka memandang tanggung jawab sebagai cita-cita yang bernilai. Namun, teori liberal memiliki akses untuk mencurigai otorisasi dan tanggung-jawab tanpa akuntabilitas, Teori liberal menuntut institusi akuntabilitas sebagai kebijakan jaminan, untuk memastikan bahwa pemimpin pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan.

Mengandalkan tanggung-jawab tanpa akuntabilitas terlalu beresiko. Tanpa tatanan institusional bagi akuntabilitas, sebagian besar agen, meskipun bertanggung-jawab, akan tetap seperti semula. Maka, kita dapat mengklaim bahwa meskipun hubungan akuntabilitas tidak ditetapkan, agen bertanggung jawab harus bertindak seakan- akan mereka 'accountable', meskipun proses ini tidak terjadi. Secara institusional,



akuntabilitas mudah didukung daripada tanggung- jawab (responsibility).

Tanggung-jawab tanpa akuntabilitas mungkin saja penting, namun hal ini lebih terkait dengan masalah moral dan psikologis daripada masalah institusi politik. Seperti yang dinyatakan Madison pada *Federalist* sia-sia saja mengatakan bahwa negarawan yang tercerahkan akan mampu menyesuaikan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan ini dan membuat semuanya sesuai dengan kebaikan publik. Seperti yang ditunjukkan teori liberal dan banyak pengalaman dalam masyarakat liberal dan non-liberal, institusi memang dibutuhkan. "Seakan-akan akuntabilitas saja" tidaklah cukup. Implikasinya adalah bahwa bahasa akuntabilitas dapat diterjemahkan kedalam bahasa ilmu politik standar: tuntutan terhadap pengaruh. Akuntabilitas tidak "sepenuhnya baik", yang mana jumlah yang lebih besar lebih baik daripada jumlah yang lebih sedikit.

Tuntutan terhadap akuntabilitas merupakan tuntutan pelaku tertentu atas kekuasaan politik. Tuntutan ini juga harus dianalisa secara positif, sebagai strategi pengaruh. Namun, tuntutan terhadap akuntabilitas tidak hanya disebutkan dalam bahasa normatif: tuntutan ini memiliki silsilah tersendiri. pada filsafat politik yang demokratis dan liberal. Meskipun kita mencurigai tuntutan pelaku tertentu terhadap akuntabilitas, kita harus menghormati tuntutan sistim politik demokrasi-liberal terhadap tatanan institusi yang mendukung akuntabilitas.

#### 1. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas pada dasarnya dimaksudkan agar kebijakan, langkah, atau kinerja yang dijalankan sebuah lembaga dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas perlu dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Berikut beberapa prinsip akuntabilitas.

- a. Memberikan jaminan dalam menggunakan sumber daya secara konsisten yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mempunyai komitmen dari pimpinan pada semua staf dalam melakukan kegiatan organisasi yang memiliki nilai akuntabel.
- c. Melakukan tujuan dari visi, misi, hasil, dan manfaat yang didapat melalui kegiatan organisasi.
- d. Memberikan informasi terkait tingkat pencapaian atas tujuan atau saran yang sebelumnya sudah ditentukan.
- e. Mempunyai prinsip yang transparan, jujur, objektif, dan juga inovatif.

## 2. Jenis Akuntabilitas

Schelder dan Plano dalam buku Akuntabilitas Konsep dan Implementasi, menuliskan lima jenis akuntabilitas. Berikut penjelasannya.

- a. Akuntabilitas fiskal, yaitu tanggung jawab atas dana publik.

- b. Akuntabilitas legal, yaitu tanggung jawab untuk mematuhi hukum.
- c. Akuntabilitas program, tanggung jawab untuk menjalankan suatu program.
- d. Akuntabilitas proses, yaitu tanggung jawab melaksanakan prosedur.
- e. Akuntabilitas outcome, yaitu tanggung jawab atas hasil.

### 3. Fungsi Akuntabilitas

Akuntabilitas memainkan peran penting untuk mendorong efisiensi, transparansi, dan integritas, baik dalam pemerintahan maupun bisnis. Adapun beberapa fungsi akuntabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan Kekuasaan  
Akuntabilitas berfungsi sebagai pencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan korupsi. Dengan adanya pertanggungjawaban, individu akan lebih berhati-

hati dalam menjalankan tugas dan membuat keputusan.

b. Sebagai Alat Ukur Keberhasilan Kerja

Akuntabilitas membantu mengukur sejauh mana pencapaian tujuan dan hasil yang telah ditetapkan.

Dengan memiliki standar kinerja yang jelas, evaluasi menjadi lebih objektif dan transparan.

c. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Kerja

Pertanggungjawaban mendorong individu atau kelompok untuk bekerja lebih fokus dan efisien dalam mencapai tujuan.

**3. Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas Publik dan Kualitas Layanan Ada beberapa alasan mengapa akuntabilitas pegawai dan lembaga pemerintah perlu ditegakkan. Pertama, pada sistem pemerintahan yang demokratis, akuntabilitas dapat menjadi instrumen agar pegawai pemerintah berperilaku dan bertindak sesuai dengan keinginan masyarakat. Dalam sistem demokrasi, lembaga dan pegawai

pemerintah diciptakan oleh masyarakat untuk melayani masyarakat dan oleh karena itu harus bertanggung jawab kepada masyarakat.

Karena hanya pemerintah yang memiliki legitimasi untuk memaksa adanya akuntabilitas dapat mencegah pegawai atau lembaga pemerintah menyalagunakan kekuasaannya. Kedua, akuntabilitas publik penting karena pegawai atau lembaga pemerintah dapat saja lalai menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan atau alpa menjalankan kewajibannya, baik disengaja ataupun tidak disengaja atau dilaksanakan dengan setengah hati. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat tidak tercapai secara optimal dan masyarakat tetap diperlakukan tidak adil.

## **B. Tinjauan Kepemimpinan Agama**

Kepemimpinan adalah sebuah kekuatan atau kemampuan yang ada di dalam diri seseorang. Sikap kepemimpinan tersebut digunakan ketika memimpin. Salah

satu pengaruh yang ditimbulkan dari sikap kepemimpinan tersebut adalah dapat mempengaruhi seseorang. Pengaruh yang diberikan ini dimaksudkan di dalam sebuah pekerjaan atau organisasi. Hal itu dikarenakan umumnya sikap kepemimpinan dibutuhkan seseorang dalam memimpin sebuah pekerjaan atau organisasi.

Kepemimpinan adalah sikap yang ada di dalam seorang pemimpin. Sedangkan pemimpin adalah seseorang yang sudah diberi kepercayaan. Kepercayaan tersebut digunakan untuk menjadi sebuah kepala atau ketua di dalam perusahaan atau organisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka seorang pemimpin tentu harus memiliki kemampuan untuk memandu anggotanya. Selain itu, seorang pemimpin harus dapat mempengaruhi sekaligus meyakinkan sekelompok orang atau seseorang. Ketika pemimpin dan anggotanya sudah berada di jalur yang sama, maka apa yang ditargetkan akan lebih mudah dicapai.

Kepemimpinan menurut Wahjosumidjo pada hakikatnya merupakan sesuatu yang melekat di dalam diri

seorang pemimpin. Sesuatu tersebut adalah berupa sifat-sifat tertentu. Seperti kepribadian atau personality, kemampuan atau ability dan kesanggupan atau capability. Kepemimpinan juga diartikan sebagai sebuah rangkaian kegiatan atau activity. Seorang pemimpin tidak akan dapat dipisahkan dengan kedudukan atau posisi, serta gaya atau perilaku dari pemimpin itu sendiri. Kepemimpinan adalah sebuah proses antara hubungan atau interaksi di antara pemimpin, anggota atau pengikutnya serta situasi.<sup>5</sup>

Menurut Moejiono, kepemimpinan atau leadership sebenarnya adalah akibat dari pengaruh yang terjadi secara satu arah. Hal itu terjadi karena seorang pemimpin mungkin memiliki sebuah kualitas tertentu. Kualitas tersebut adalah sesuatu yang membedakan dirinya dengan para pengikutnya. Para ahli teori sukarela atau compliance induction theorist, akan cenderung memandang sebuah kepemimpinan atau leadership sebagai pemaksaan. Selain itu, kepemimpinan

---

<sup>5</sup> Lia Kusuma Dewantari , Perdi (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Catatan Dana Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*. Volume 5, No 2 april 2022.



adalah pendesakan pengaruh yang terjadi secara tidak langsung. Kepemimpinan adalah sarana untuk membentuk sebuah kelompok yang sesuai dengan keinginan pemimpinnya.

Teori ini membuat asumsi mengenai sifat kepemimpinan dan bakat kepemimpinan. Teori ini menyebutkan bahwa hal-hal tersebut dibawa seseorang sejak orang itu dilahirkan. Meskipun tidak dapat diidentifikasi dengan sebuah kajian ilmiah mengenai karakteristik serta kombinasi manusia seperti hal apa yang bisa dikatakan sebagai pemimpin yang hebat, tetapi sudah banyak orang mengakui bahwa hanya satu orang di antara banyak individu, pasti memiliki ciri khas sebagai seorang pemimpin yang hebat.

Dalam masyarakat beradab, kepemimpinan dibangun atas dasar konsensus nilai-nilai kearifan lokal. Jika kultur dan kearifan lokal dikaitkan dengan aktivitas kepemimpinan, maka ia menjadi sebuah entitas yang tidak bisa dipisahkan. Kepemimpinan tidak bisa terlepas dari nilai-nilai budaya dan

kehidupan sosial masyarakat yang dianut. Ia tidak bisa dipertentangkan, tetapi ia harus direlasikan atau bahkan diintegrasikan. Salah satu ciri kearifan lokal adalah memiliki tingkat solidaritas yang tinggi atas lingkungannya.

Dalam khasanah sosiologi Islam, Ibnu Khaldun dikenal sebagai peletak dasar teori solidaritas masyarakat atau dikenal dengan teori 'Ashâbiyat. Teori ini merupakan pengejawantahan dari teori harmonika al-jasad al-wahid dalam ajaran Islam, yang menggambarkan kelaziman saling melindungi dan mengembangkan potensi serta saling mengisi dan membantu di antara sesama. Melalui teori harmonika al-jasad al-wahid dimisalkan kehidupan komunitas muslim itu dengan ka al-bunyan yasuddu ba'duha ba'dla bagaikan sebuah bangunan, yang antara elemen bangunan yang satu dengan yang lainnya saling memperkokoh memperkuat Teori 'Ashâbiyat solidaritas kelompok dan konsep ta'âwun al-ihsan itu didasarkan atas pemikiran ajaran Islam, yang di dalamnya terkandung norma akidah dan syari'at.

Ibnu Taimiyyah menyatakan agama Islam tidak akan bisa tegak dan abadi tanpa ditunjang oleh kekuasaan, dan kekuasaan tidak bisa langgeng tanpa ditunjang dengan agama. Dalam Islam istilah kepemimpinan dikenal dengan kata Imamah. Dalam hal ini pemimpin harus memiliki Karakteristik, karakteristik manusia yang mempunyai motivasi tinggi untuk menjadi pemimpin tampak dalam tingkah laku yang dilandaskan pada suatu keyakinan yang sangat mendalam bahwa apa yang dilakukannya merupakan bagian dari ibadah kepada Allah.

Pemimpin merupakan suatu panggilan yang sangat mulia dan perintah dari Allah yang menempatkan dirinya sebagai makhluk pilihan sehingga tumbuh dalam dirinya kehati-hatian, menghargai waktu, hemat, produktif, dan memperlebar sifat kasih sayang sesama manusia. Kelompok solidaritas sebagai dasar kehidupan yang dilandasi oleh iman dan akhlak mulia seperti yang dicontohkan Rasulullah Saw,

dapat memberikan kekuatan terhadap tatanan kerja sama kemanusiaan (ta'âwun al-ihsan).<sup>6</sup>

Apabila teori tersebut dihubungkan dengan kegiatan kepemimpinan, maka akan dapat mendorong masyarakat untuk bersatu dan partisipatif aktif dalam proses pembangunan di seluruh sektor kehidupan. Motivasi seseorang untuk mengambil bagian dalam suatu proses kepemimpinan sangat beragam sama dengan motivasi seseorang untuk melaksanakan ibadah, seperti salat, puasa, dan lain sebagainya. Keragaman motivasi atau latar belakang niat seseorang dalam bertindak adalah suatu hal yang tidak terelakan dan secara hukum tidak dipersalahkan.

Sejarah menjelaskan kepada kita, ketika Nabi Muhammad saw berhijrah bersama para pengikutnya, beliau mengatakan bahwa motivasi dan keikutsertaan para pengikutnya itu beragam, ada yang bermotivkan kekayaan, dan ada juga karena dorongan wanita yang ingin dinikahnya

---

<sup>6</sup> Abdul Qodir & Sarbiran (2011). Kaderisasi Kepemimpinan Agama Melalui Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi*. No 3 tahun 2011, 1(2) 141-155.

Semuanya itu dapat diterima, hanya saja kualitas partisipasi yang terbaik dan tertinggi dalam pandangan agama Islam adalah karena Allah swt.

Karakter yang harus dimiliki dalam sebuah kepemimpinan adalah: Pertama, Shidiq (jujur). Seorang pemimpin wajib berlaku jujur dalam melaksanakan pekerjaannya. Jujur dalam arti luas. Tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak bekhianat, serta tidak pernah mengingkari janji dan sebagainya. Mengapa harus jujur? Karena berbagai tindakan tidak jujur selain merupakan perbuatan yang jelas-jelas dosa, jika biasa dilakukan, juga akan mewarnai dan berdampak negatif terhadap kehidupan pribadi dan keluarga pemimpin itu sendiri. Terlebih lagi, sikap dan tindakan yang seperti itu akan mewarnai dan mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Dalam Alquran, keharusan bersikap jujur dalam memimpin, sudah dinyatakan dengan sangat jelas dan tegas antara lain kejujuran tersebut. Di beberapa ayat, dikehendaki dengan pelaksanaan timbangan, sebagaimana Firman Allah

swt: Sempurnakanlah takaran dan timbang dengan adil. (QS Al An'aam : 152).

Kedua, Amanah (tanggung jawab). Setiap pemimpin harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan dan atau jabatan yang telah dipilihnya. Tanggung jawab di sini artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang memang secara otomatis terbeban di pundaknya. Dalam pandangan Islam, setiap pekerjaan manusia adalah mulia. Pemimpin merupakan suatu tugas mulia, karena ditampilkan antara lain memenuhi kebutuhan seluruh anggota masyarakat akan barang dan atau jasa untuk kepentingan hidup dan kehidupannya.

Ketiga, jangan ditipu. Pemimpin hendaknya menghindari penipuan, sumpah palsu, janji palsu, keserakahan, keburukan dan keburukan perilaku polah manusia lainnya. Setiap sumpah yang keluar dan mulut manusia harus dengan nama Allah. Jika sudah dengan nama Allah, maka harus benar dan jujur. Jika tidak terjadi, maka akibatnya sangatlah fatal. Oleh karena itu, Rasulullah saw

selalu memperingatkan kepada para pemimpin untuk tidak mengobral janji atau berpromosi secara berlebihan yang cenderung mengada-ngada, semata-mata agar terpilih, karena jika seorang pedagang berani bersumpah palsu, akibat yang akan menimpa dirinya hanyalah kerugian.

Keempat, murah hati. Dalam suatu hadis, Rasulullah saw menganjurkan agar para pemimpin selalu bermurah hati dalam melaksanakan pemerintahani. Murah hati dalam pengertian; ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah, namun tetap penuh tanggungjawab. Sabda Rasulullah SAW: “Allah berbelas kasih kepada orang yang murah hati ketika ia menjual, bila membeli dan atau ketika menuntut hak”. (HR Bukhari)

Kelima, tidak melupakan akhirat. Kepemimpinan adalah perdagangan dunia, sedangkan melaksanakan kewajiban Syariat Islam adalah perdagangan akhirat. Keuntungan akhirat pasti lebih utama ketimbang keuntungan dunia. Maka para pemimpin muslim sekali-kali tidak boleh terlalu menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari

keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat. Sehingga jika datang waktu salat, mereka wajib melaksanakannya sebelum habis waktunya. Alangkah baiknya, jika mereka bergegas bersama-sama melaksanakan salat berjamaah, ketika azan telah dikumandangkan. Begitu pula dengan pelaksanaan kewajiban memenuhi rukun Islam yang lain. Sekali-kali seorang pemimpin muslim hendaknya tidak melalaikan kewajiban agamanya dengan alasan kesibukan pemerintahan.

